

BELAJAR DARI RUMAH PEMERINTAH TERSERAH SEKOLAH



BDR: Kewajiban Pemerintah Jadi Tugas Sekolah

MEMBURUKNYA kualitas udara di Kabupaten akibat kabut asap yang kembali pekat dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran terhadap kesehatan anak sekolah.

Dinas Pendidikan Berau menegaskan, kebijakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, termasuk opsi Belajar Dari Rumah (BDR), diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan masing-masing satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, menjelaskan, langkah penyesuaian model pembelajaran tersebut telah diatur secara rinci melalui pedoman resmi yang mengacu pada instruksi daerah dan pusat.

Setiap sekolah diminta untuk aktif memantau kondisi lingkungan sekitar sebelum mengambil keputusan di tingkat lokal.

“Sudah di Surat Edaran Sekda terakhir itu kan ada di poin 4. Jadi yang menentukan itu sekolah masing-masing,” ungkap Mardiatul kepada Berauterkini, Senin (5/10/2026).

Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Edaran Nomor 800/3402/Umpeg-Disdik tertanggal 23 September 2026, khususnya pada poin keempat yang menginstruksikan pihak sekolah agar rutin memantau

kualitas udara sebanyak dua kali sehari, yakni sebelum kegiatan pembelajaran dimulai serta pada siang hari.

Apabila terjadi fluktuasi kualitas udara, Kepala Satuan Pendidikan memiliki diskresi untuk mengambil tindakan berdasarkan kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang bersumber dari Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila ISPU berada pada rentang 0-50 dengan kategori baik, seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka dapat berjalan secara penuh dan normal.

Jika kualitas udara berada pada kategori sedang dengan angka ISPU 51-100, kegiatan belajar tatap muka tetap dilanjutkan secara penuh, namun seluruh aktivitas fisik siswa wajib dialihkan ke dalam ruangan.

Sementara itu, apabila kualitas udara memasuki kategori tidak sehat dengan angka ISPU 101-200, sekolah diwajibkan menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas melalui pengurangan durasi jam belajar.

Selain itu, memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar Dari Rumah bagi kelompok rentan, seperti murid PAUD, siswa kelas rendah tingkat SD, anak-anak dengan penyakit penyerta maupun dis-



abilitas, serta pelajar di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Adapun jika kondisi udara memburuk hingga mencatatkan angka ISPU di atas 200 dengan kategori sangat tidak sehat atau berbahaya atau apabila pantauan visual menunjukkan kabut asap telah memperpendek jarak pandang hingga mengancam keselamatan, maka pihak sekolah diinstruksikan untuk segera menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka.

Mengingat kondisi geografis Berau yang luas dan memiliki tingkat sebaran asap yang tidak merata di setiap wilayah, kebijakan desentralisasi keputusan ini dinilai menjadi langkah paling efektif untuk melindungi kesehatan para peserta didik.

“Edarannya sudah ada di nomor 4, kita sudah kasih tahu, sekolah yang menentukannya, karena kan tidak semua kecamatan itu sama kondisinya,”

imbuhnya.

KEBIJAKAN TEPAT

Kepala SDN 017 Tanjung Redeb, Sunarmi, menyebut, pelimpahan kewenangan ini sangat tepat. Pasalnya, sekolah bisa mengambil keputusan secara cepat berdasarkan situasi lingkungan sekitar dengan tetap memprioritaskan kesehatan, keselamatan, serta kenyamanan para peserta didik dan guru.

“Untuk SDN 017 Tanjung Redeb sendiri, kami akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan mempertimbangkan kondisi di lingkungan sekolah sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan atau perlu dilakukan BDR,” jelas Sunarmi, Kamis (8/10/2026).

Ia menilai pola kebijakan yang tidak dipukul rata ini jauh lebih efektif karena setiap wilayah memiliki tingkat paparan udara yang berbeda.

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 3





“Yang terpenting, keputusan yang diambil tetap mengacu pada ketentuan dan arahan Dinas Pendidikan serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan anak-anak,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Berau, Saleh, menjelaskan, kebijakan pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas tetap berpedoman pada surat edaran resmi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur.

Kendati demikian, pihak sekolah tetap bersiaga mengambil langkah penyesuaian prosedural apabila terjadi perubahan kualitas udara yang signifikan secara mendadak. Namun, tetap berkoordinasi secara intensif dengan instansi tingkat wilayah.

PENUH TANTANGAN

Di sisi lain, para siswa menyatakan lebih senang belajar tatap muka di sekolah dibanding BDR. Salah satu siswa sekolah di Berau, Amanda, mengatakan, kondisi saat ini antara BDR dan belajar tatap muka memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing.

Ia menilai, baik BDR ataupun tatap muka, sama-sama dihadapkan dengan tugas yang menumpuk. Namun, ia

tetap memilih untuk belajar di sekolah. Sebab, ketika BDR jaringan internet bisa tiba-tiba buruk di tengah pembelajaran.

Belajar tatap muka juga dinilai lebih menyenangkan karena siswa akan mendapatkan uang saku harian.

“Sebenarnya 50 persen BDR, 50 persen tatap muka, tapi lebih ke tatap muka. Kalau BDR itu ribet ketika jaringannya jelek,” ujar Amanda.

Senada dengan Amanda, siswa lainnya bernama Shabrina juga memilih belajar tatap muka di sekolah. Ia menilai belajar tatap muka lebih efektif karena ketika guru memberikan materi secara langsung, siswa akan lebih mudah paham.

Ketika belajar tatap muka, kata Shabrina, tugas yang diberikan tidak begitu banyak dan dapat dikerjakan dengan baik.

“Kalau tatap muka tugasnya tidak terlalu banyak, sedangkan saat BDR tugasnya banyak dan deadlinenya mepet semua, serta Zoom sampai sore sesuai jam pelajaran saat tatap muka,” ujarnya.

Sementara itu, meski mendukung BDR, pelaksanaannya juga menimbulkan sejumlah tantangan bagi orang tua, terutama mereka yang harus tetap bekerja.

Salah seorang orang tua siswa, Andini, mengatakan dirinya memahami kebijakan BDR yang diterapkan pemerintah. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat kesehatan anak perlu menjadi perhatian, terlebih anak-anak cukup rentan terhadap gangguan pernapasan.

“Kalau untuk kebijakannya saya rasa sudah tepat, karena anak-anak memang rawan terkena dampak asap dan ISPA,” ujar Andini.

Meski demikian, penerapan BDR membuat orang tua harus menyesuaikan kembali jadwal aktivitas keluarga. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi orang tua yang memiliki pekerjaan dan tidak dapat selalu mendampingi anak selama proses pembelajaran.

Andini juga menyoroti metode pembelajaran secara daring yang menggunakan aplikasi Zoom. Menurutnya, metode tersebut tidak selalu mudah diterapkan, terutama bagi anak usia dini yang belum terbiasa mengikuti pembelajaran melalui perangkat digital.

“Agak kurang suka karena harus mengatur ulang jadwal anak, sementara emaknya juga bekerja. Terus harus lewat Zoom, anak juga belum familiar sama Zoom,” katanya.

Orang tua siswa lainnya,

Isnaniah, menginginkan anak mendapatkan pembelajaran yang maksimal meskipun dilakukan dari rumah. Keberadaan guru tetap penting karena guru memiliki pengalaman dalam mengajar dan memahami bagaimana menyampaikan materi kepada anak sesuai dengan usianya.

“Orang tua pasti ingin anaknya diajari oleh guru yang punya pengalaman mengajar, apalagi orang tua yang sibuk bekerja,” tuturnya.

Meski begitu, Isnaniah memahami, pembelajaran tatap muka tidak dapat dipaksakan ketika kondisi udara masih berisiko bagi kesehatan anak.

Yang perlu menjadi perhatian adalah adanya langkah penanganan yang cepat agar kondisi kabut asap tidak berlangsung berkepanjangan dan BDR tidak menjadi solusi yang terus diterapkan.

“Tidak bisa juga memaksakan anak untuk sekolah kalau memang kondisinya berisiko. Tapi pengambil kebijakan harus cepat menangani kondisi ini. Jangan sampai solusinya BDR terus, harus ada langkah lain supaya kondisi segera membaik dan anak-anak bisa kembali belajar normal,” pungkasnya. (ADRIKNI SHOLIKHATI/DINI DIVA APRILIA)

RSUD Tanjung Redeb Dikelola Pemprov Kaltim Saja

DPRD Kabupaten Berau mengusulkan operasional RSUD Tanjung Redeb diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai hal itu dapat menjadi solusi efektif untuk meringankan beban fiskal daerah yang kian berat.

Dedy menyatakan dukungannya apabila Pemprov Kaltim bersedia memberikan intervensi dan dukungan penuh terhadap pembiayaan operasional rumah sakit baru tersebut.

Menurutnya, langkah ini akan menyelamatkan keuangan daerah dari pos pengeluaran ganda untuk pemeliharaan dua rumah sakit milik pemerintah.

"Jadi kita tidak ada beban fiskal kedua rumah sakit tapi provinsi yang membiayai," ungkap Dedy kepada Berauterkini.

Ia menilai realisasi gagasan tersebut kini bergantung pada langkah pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan resmi kepada provinsi.

Dengan demikian, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak



DEDY OKTO NOORYANTO
DPRD Berau



Jadi kita tidak ada beban fiskal kedua rumah sakit tapi provinsi yang membiayai"

tersedot sepenuhnya hanya untuk sektor kesehatan.

"Kalau bisa pemerintah daerah mengajukan ke provinsi untuk provinsi yang kelola, itu paling bagus," harapnya.

Dedy menjelaskan, pengelolaan di tingkat provinsi diyakini akan lebih optimal dalam mempercepat pemenuhan berbagai fasilitas medis dan sarana penunjang yang saat ini masih belum lengkap di ru-



mah sakit baru tersebut.

Di samping itu, pola pengelolaan lintas pemerintahan ini juga diyakini dapat menciptakan diferensiasi kelas atau tipe fasilitas kesehatan.

Jika dikelola oleh provinsi, RSUD Tanjung Redeb berpeluang naik tingkat menjadi rumah sakit rujukan dengan tipe yang berbeda dari RSUD dr Abdul Rivai.

Sehingga kehadiran dua rumah sakit dalam satu wilayah tidak beririsan pada fungsi yang sama.

"Kalau kita punya dua rumah sakit yang tipenya sama kan untuk apa, mending dinaikkan. Kalau provinsi mau menyambut silakan supaya lebih naik yang kita inginkan," katanya.

Ia juga menyoroti status ad-

ministratif RSUD Tanjung Redeb yang hingga kini tercatat belum terdaftar secara resmi di Kementerian Kesehatan, di mana fasilitas kesehatan milik daerah yang terdaftar secara sah baru mencakup RSUD dr Abdul Rivai.

Kondisi tersebut berdampak pada alokasi anggaran dari pusat yang selama ini terpusat pada RSUD Abdul Rivai. Oleh karena itu, pelibatan pemerintah provinsi dinilai menjadi jalan keluar paling rasional sebelum seluruh aspek legalitas administratifnya rampung ditata.

"Rumah sakit itu kan belum terdaftar, maksud saya kalau memang belum terdaftar lebih pendekatan ke provinsi lah, tapi tergantung Bupati lagi," pungkasnya.

(ADRIKNI SHOLIKHATI)





Jemput Dukungan Pemerintah Pusat Bupati Temui Menaker dan Kemenhub

PEMERINTAH Kabupaten Berau terus melakukan lobi-lobi ke sejumlah kementerian guna mendapatkan dukungan untuk berbagai program di daerah. Bupati Berau, Sri Juniarsih, bersama jajarannya melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan.

Saat melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (8/10/2026), Sri Juniarsih membidik dukungan program vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal sekaligus menekan angka pengangguran.

Sri Juniarsih memaparkan potensi daerah serta tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi Berau. Salah satu fokus pemerintah daerah adalah mempersiapkan masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"Tadi kami membicarakan banyak hal, bagaimana mempersiapkan masyarakat Berau yang siap kerja," ungkap Sri Juniarsih.

Menurutnya, peningkatan kompetensi SDM menjadi kebutuhan penting bagi Berau yang terus berupaya mengembangkan potensi ekonomi di luar sektor pertambangan.

Sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang berpeluang dikembangkan. Potensi wisata yang tersebar di berbagai kecamatan dinilai membutuhkan dukungan tenaga kerja yang terampil dan profesional agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Karena itu, Pemkab Berau berharap dukungan pemerintah pusat melalui program vokasi dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan hingga mengembangkan usaha secara mandiri.

"Alhamdulillah kita mendapat dukungan dan ini kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Berau," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, siap mendukung pengembangan kompetensi SDM di Berau.

Potensi daerah perlu diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yang memadai agar pe-

luang ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Kemenaker siap mendukung program pengembangan keterampilan praktis yang berorientasi pada kesiapan kerja.

Upaya tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

"Ini salah satu hal yang siap kita eksekusi dalam waktu cepat, tentu kita berharap Berau semakin maju dengan didukung tenaga kerja andal, kompetitif, dan profesional," ujarnya.

Pemkab Berau juga memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikan sejumlah program prioritas saat audiensi bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Diterima langsung Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, Sri Juniarsih memaparkan berbagai usulan strategis guna memperkuat infrastruktur transportasi di Bumi Batiwakkal.

Fokus utama usulan terse-

but meliputi pengadaan bus sekolah, pengembangan layanan Bus Trans Berau yang menjadi program unggulan daerah, penambahan lampu penerangan jalan umum (PJU), serta berbagai sarana pendukung keselamatan lalu lintas lainnya.

Peningkatan fasilitas transportasi darat ini dinilai krusial untuk menjamin kelancaran mobilitas harian masyarakat.

Di samping itu, ketersediaan sarana transportasi yang memadai juga menjadi pilar penting dalam menopang sektor pariwisata Berau yang telah mendunia, terutama mengingat wilayah ini memiliki kawasan yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta destinasi andalan seperti Pulau Maratua.

"Kami berharap apa yang kami sampaikan dan kami mohonkan dapat menjadi perhatian dan diprioritaskan, sehingga dapat direalisasikan untuk mempermudah akses masyarakat sekaligus menunjang konektivitas menuju kawasan pariwisata di Kabupaten Berau," ujar Sri Juniarsih. (DINI DIVA APRILIA)

Modus Akali Aturan Isi BBM Subsidi

Motor Berplat Ganda Isi Bensin Berulang di SPBU

KEBIJAKAN pembatasan pengisian BBM subsidi bagi sepeda motor maksimal satu kali dalam sehari mulai memunculkan modus baru.

Pertamina Patra Niaga menemukan adanya celah yang diduga dimanfaatkan oknum untuk tetap mengisi BBM subsidi berulang kali, yakni dengan menggunakan nomor polisi berbeda.

Dugaan penggunaan plat nomor ganda tersebut menjadi perhatian Pertamina Patra Niaga bersama aparat penegak hukum (APH) dan Dinas Perhubungan.

Pengawasan dilakukan salah satunya di SPBU Jalan Bujangga, Tanjung Redeb, Senin (5/10/2026).

Sales Branch Manager (SBM) III Fuel Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimut) PT Pertamina Patra Niaga, Hermawan Bagus, mengatakan, pengawasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi penerapan sistem pembatasan pengisian BBM subsidi yang telah berjalan di Kabupaten Berau.

Menurut Hermawan, secara umum sistem yang diterapkan telah berjalan cukup baik.

Namun, pihaknya menemukan sejumlah celah yang berpotensi dimanfaatkan oknum untuk mengakali aturan.

"Celah ini akan selalu dipantau. Karena penggunaan nomor polisi ganda dan pemalsuan nomor polisi itu bisa saja dipergunakan oleh berbagai oknum," katanya.

Karena itu, Pertamina bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan APH melakukan evaluasi terhadap sejumlah potensi pelanggaran.

Termasuk dugaan pemalsuan data kendaraan maupun penggunaan plat nomor yang tidak sesuai dengan kendaraan.

"Kami melakukan beberapa evaluasi, termasuk sanksi yang bisa dikenakan oleh APH apabila ada oknum yang menyalahgunakan atau melakukan pemalsuan data atau plat kendaraan palsu," jelas Hermawan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga ketertiban dalam



penerapan kebijakan tersebut, terutama dengan memastikan data kendaraan yang digunakan saat pengisian BBM sesuai dengan kendaraan sebenarnya.

"Semua data yang masuk ke SPBU harus sesuai dengan nomor kendaraan dan data dari Lantas," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Satlantas Polres Berau, Aiptu Lukito, mengatakan, penggunaan nomor polisi berbeda untuk kendaraan yang sama dapat masuk dalam pelanggaran lalu lintas.

Jika hanya terjadi pergantian plat nomor, pihaknya dapat melakukan penindakan berupa tilang.

Namun, apabila ditemukan unsur pemalsuan plat nomor kendaraan, kasus tersebut dapat berlanjut ke ranah pidana dan diserahkan kepada Satreskrim Polres Berau.

Pengawasan juga tidak hanya menyasar konsumen. Bagus kem-

bali mengingatkan operator SPBU agar disiplin memasukkan data kendaraan ke dalam sistem yang telah disiapkan.

Selain melalui data digital, identifikasi juga dapat dilakukan dengan mencocokkan kendaraan yang datang ke SPBU dengan nomor polisi yang digunakan.

Dia menyebut telah menemukan adanya kendaraan yang beberapa kali melakukan pengisian dengan nomor polisi berbeda.

Kondisi tersebut menjadi salah satu indikasi yang kini mendapat perhatian dalam pengawasan.

"Kemarin dari masyarakat ada temuan beberapa pihak yang sudah beberapa kali mengisi di sini dan menggunakan plat nomor yang berbeda dengan kendaraan yang sama," ungkapnya.

Pengawasan juga diperkuat dengan keberadaan kamera CCTV di SPBU yang beroperasi selama 24 jam.

Rekaman tersebut dapat digunakan untuk mencocokkan kendaraan dengan nomor polisi yang tercatat dalam sistem.

"Jadi harapannya ke depan, tidak hanya kita monitor dari konsumen, tetapi dari segi operator juga akan kita monitor," pungkasnya. (HENDRA IRAWAN)



Jangan Ada Keluhan Atlet Tapi Anggaran Masih Sulit

SATU bulan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur VIII di Kabupaten Paser, persiapan kontingen Kabupaten Berau masih dihadapkan pada tantangan finansial.

Saat rapat koordinasi antara Dispora bersama KONI dan DPRD Berau, Selasa (6/10/2026), terungkap total alokasi anggaran yang tersedia di Dispora masih menyisakan defisit.

Saat ini anggaran yang tersedia bersumber dari APBD Murni sebesar Rp1,5 miliar ditambah alokasi penambahan Rp3 miliar melalui ABT, yang secara keseluruhan dialokasikan untuk membiayai konsumsi, perlengkapan pakaian, asuransi, hingga akomodasi.

Berdasarkan data KONI, jumlah kontingen Berau yang akan diberangkatkan mencapai 800 orang, terdiri dari 732 atlet beserta para pendamping.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua KONI Berau, Taupan Madjid, menegaskan perlunya keterlibatan perusahaan swasta untuk meringankan beban pembiayaan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, pembiayaan dunia olahraga daerah tidak

dapat sepenuhnya diserahkan kepada anggaran pemerintah yang terbatas.

Ia berharap kepala daerah dapat segera mengagendakan pertemuan khusus dengan para pimpinan perusahaan swasta yang beroperasi di Berau.

Langkah ini dinilai sangat mendesak mengingat para atlet saat ini menjalani latihan mandiri tanpa pemusatan latihan secara penuh, sehingga pasokan nutrisi dan vitamin tambahan sangat bergantung pada dukungan pihak luar.

"Kita berharap dari pihak perusahaan itu meringankan beban, sehingga yang disampaikan Dispora tadi ada kekurangan, itu bisa tertutupi," ungkap Taupan.

Taupan menambahkan, dari total 64 cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang Porprov Kaltim 2026, kontingen Berau dipastikan akan ambil bagian pada 47 cabang olahraga.

Kendati tanpa fasilitas pemusatan latihan yang ideal, ia tetap optimis para atlet dapat berangkat dan berjuang secara maksimal.

"Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan nanti dengan perusahaan itu, kalau misalnya ada dana lebih cadangan, nah kita bisa berkontribusi untuk vitamin dan

nutrisinya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengatakan pihaknya berkomitmen mengawal proses pendanaan agar seluruh kebutuhan atlet dan ofisial Porprov Kaltim 2026 dapat terpenuhi secara optimal tanpa hambatan berarti.

Dedy menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah daerah maupun induk cabang olahraga dapat mengelola anggaran yang tersedia untuk Porprov Kaltim 2026 dengan cermat.

Ia secara khusus meminta agar tidak sampai muncul keluhan dari para atlet setelah pelaksanaan kegiatan akibat buruknya perencanaan.

Pihaknya juga memastikan akan mendorong dan mengawal rencana pemerintah daerah untuk mengundang para pelaku usaha swasta agar turut ambil bagian memberikan kontribusi nyata bagi dunia olahraga Berau melalui skema CSR.

Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal harus memiliki kepedulian sosial yang sejalan dengan kemajuan prestasi daerah.

"Saya sebagai Ketua Dewan (DPRD Berau) berharap jangan sampai ada keluhan-keluhan," tutur Dedy.

Ia menilai sektor olahraga memiliki keterkaitan erat den-



TAUPAN MADJID
Ketua KONI Berau

Kita berharap dari pihak perusahaan itu meringankan beban, sehingga yang disampaikan Dispora tadi ada kekurangan, itu bisa tertutupi"

gan sektor strategis lainnya, termasuk pariwisata daerah.

Oleh karena itu, sinergi lintas sektor harus terus dijaga agar kemajuan prestasi olahraga dapat berjalan selaras dengan perkembangan pariwisata Berau.

"Olahraga berhubungan dengan pariwisata. Pariwisata maju, olahraga pun harus maju. Berau ada pariwisatanya dan mereka pengen berkunjung ke sini, ini terkoneksi," tutupnya. (ADRIKNI SHOLIKHATI)



Maratua Jazz Ditunda KARENA KARHUTLA

MARATUA Jazz and Dive Fiesta (MJDF) 2026 terpaksa harus mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Agenda yang semula dijadwalkan bergulir pada 8-11 Oktober 2026 di Pulau Maratua tersebut diputuskan untuk diundur menyusul masifnya dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Keputusan penundaan ini diambil setelah melalui serangkaian pertimbangan matang, menyerap masukan dari berbagai pihak, serta evaluasi terhadap faktor keselamatan, kenyamanan wisatawan, pelaku usaha, dan kesiapan teknis di lapangan.

Founder MJDF, Juhriansyah, mengungkapkan, penundaan ini diambil demi menghindari penyelenggaraan dari risiko buruk, berkaca dari pengalaman pahit pada pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya.

Tercatat, MJDF pernah dipaksa berjalan di tengah kepungan kabut asap karhutla pada 2015 dan 2019.

"Penundaan MJDF 2026 juga merupakan hasil dari pengalaman panitia dalam menyelenggarakan event sebelumnya," ungkap Juhriansyah kepada Berauterkini, Sela-



sa (6/10/2026).

Pada dua penyelenggaraan terdahulu, panitia sempat mencoba untuk tetap mempertahankan jadwal kegiatan meskipun situasi lingkungan kurang mendukung.

Kendati demikian, situasi yang dipaksakan tersebut justru menghadirkan berbagai dampak, mulai buruknya kualitas udara, terganggunya aksesibilitas, menurunnya tingkat kenyamanan peserta dan wisatawan, hingga berbagai hambatan teknis yang berada di luar kendali panitia.

Dari pengalaman tersebut, penyelenggara sepakat untuk tidak mengulangi kesalahan serupa dengan memaksakan agenda ketika kondisi ekologis belum sepenuhnya kondusif.

Hal itu upaya untuk memberi-



kan pengalaman wisata yang aman dan berkesan bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Kami belajar bahwa sebuah event seperti MJDF harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kesiapan destinasi. Karena itu, kali ini kami memilih untuk mengundur pelaksanaan event utama, tetapi tidak menghentikan semangat dan gerakan promosinya," jelas pria yang akrab disapa Rian ini.

Mengenai kepastian jadwal pengganti, panitia masih merumuskannya bersama lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi.

Saat ini, panitia telah mengerucutkan dua opsi waktu pelaksanaan, yakni pada 12-15 November atau 3-6

Desember mendatang.

Kendati demikian, penetapan jadwal baru tersebut masih bersifat tentatif, mengingat panitia harus melakukan konfirmasi ulang kepada para pengisi acara dan musisi pengisi panggung terkait ketersediaan jadwal mereka.

"Pelaksanaannya kemungkinan di November, sekarang lagi dikoordinasikan dengan para pihak, ini masih tentatif ya," katanya.

"Kita lagi pastikan talent pengisi acaranya, apakah yang rencananya tampil tanggal 8 Oktober ini masih ada jadwal untuk bulan November atau tidak," tutupnya. (ADRIKNI SHOLIKHATI)



DIREKSI

Komisaris : M. Syaifuddin Zuhrie
Direktur : Rengkuh Enggalingtyaz, Digital
Marketing Manager : Aidil Anugrah, Iklan :
Siti Nur Ariska, Admin : Tariska Ramadayani

Advokat & Konsultan Hukum : Firma Hukum H.A.M & Partner

Email Redaksi : berauterkini2023@gmail.com, Iklan dan informasi : berauterkini2023@gmail.com
Alamat Redaksi : Ruko Komplek Perumahan Berau Indah, Telepon : 0851-6366-0045

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi : Robithoh Johan Palupi,
Koordinator Liputan : Rusdiyono, Editor: Maulana Ilhami Fawdi, Reporter :
Sulaiman, Hendra Irawan, Dini Diva, Adrikni Sholikhati, Grafis : Surya Adji
Permana, Media Sosial : Siti Nur Ariska, IT & Web Development : Fathurrohman.